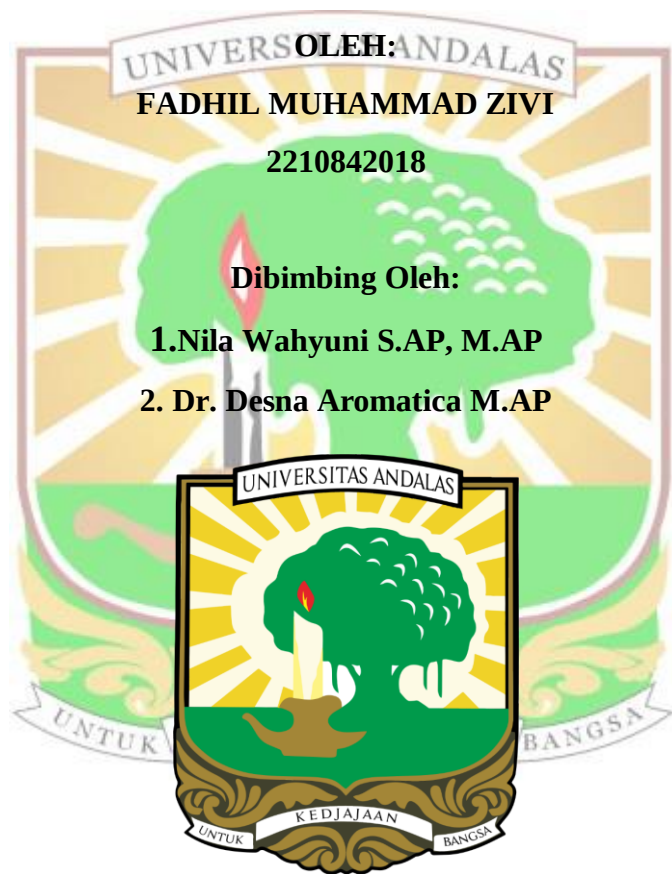


**IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN
GELAP NARKOBA (P4GN) OLEH BADAN NARKOTIKA
NASIONAL PROVINSI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Administrasi Publik
Pada Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Andalas*



**DEPARTEMEN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2026

ABSTRAK

Fadhil Muhammad Zivi, 2210842018, Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat, Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang, 2026. Dibimbing oleh: Nila Wahyuni S.AP, M.AP dan Dr. Desna Aromatica M.AP. Skripsi ini terdiri dari 136 Halaman dengan 13 buku teori & metode, 2 skripsi, 8 jurnal, 3 undang-undang, 1 peraturan presiden, 1 Peraturan daerah dan 4 dokumen

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat. Masalah penyalahgunaan narkoba di Sumatera Barat menempati peringkat ke-12 secara nasional, yang menegaskan urgensi pelaksanaan program ini melampaui sekadar formalitas administratif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pisau analisis model implementasi kebijakan dari Donald Van Meter dan Carl Van Horn, yang membedah keberhasilan kebijakan melalui enam variabel kunci yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik agen pelaksana, sikap (disposisi) pelaksana, komunikasi antar-organisasi, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi dengan teknik pemilihan informan menggunakan *purposive sampling*, dilengkapi dengan triangulasi sumber untuk keabsahan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program P4GN oleh BNNP Sumatera Barat, khususnya pada fungsi pencegahan, masih menghadapi hambatan struktural dan substansial yang signifikan di lapangan. Pada variabel ukuran dan tujuan kebijakan, terjadi pergeseran orientasi di mana sasaran kebijakan yang seharusnya bersifat transformatif dalam mengubah perilaku masyarakat tereduksi menjadi pemenuhan target administratif-kuantitatif semata. Variabel sumber daya menunjukkan adanya disparitas alokasi anggaran yang tajam, anggaran untuk kegiatan pencegahan langsung ke masyarakat sangat terbatas. Hal ini memicu ketimpangan wilayah, di mana program terpusat di Kota Padang, sedangkan kabupaten/kota lain yang secara geografis jauh dan rawan peredaran gelap narkoba kurang terjangkau. Keterbatasan kelembagaan juga terlihat dari baru terbentuknya 4 BNNK untuk melayani 19 kabupaten/kota. Karakteristik agen pelaksana cenderung kaku karena fokus birokrasi terpusat pada kepatuhan hierarki internal daripada inovasi pencegahan yang adaptif. Dari aspek disposisi, implementor menerima kebijakan secara top-down. Komunikasi dan koordinasi lintas sektor masih bersifat formalistik dan terfragmentasi. Lingkungan sosial belum mendukung optimal akibat kuatnya stigma negatif dan resistensi masyarakat terhadap mantan pengguna narkoba, serta program yang dirancang kurang mengintegrasikan konteks sosial-budaya lokal Sumatera Barat.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, P4GN, BNNP Sumatera Barat, Van Meter dan Van Horn, Pencegahan Narkoba.

ABSTRACT

Fadhil Muhammad Zivi, 2210842018, Implementation of the Prevention, Eradication of Drug Abuse, and Illicit Trafficking (P4GN) Program by the National Narcotics Board of West Sumatra Province, Department of Public Administration, Faculty of Social and Political Sciences, Andalas University, Padang, 2026. Supervised by: Nila Wahyuni S.AP, M.AP and Dr. Desna Aromatica M.AP. This thesis consists of 136 pages with 13 theoretical & methodological books, 2 prior theses, 8 journals, 3 laws, 1 presidential regulations, 1 regional regulations, and 4 documents.

This study aims to describe and analyze the implementation of the Prevention, Eradication of Drug Abuse, and Illicit Trafficking (P4GN) Program by the National Narcotics Board of West Sumatra Province (BNNP Sumatera Barat). The drug abuse problem in West Sumatra ranks 12th nationally, highlighting the urgency of this program beyond mere administrative formalities. This study uses a descriptive qualitative approach with the policy implementation model framework by Donald Van Meter and Carl Van Horn, which dissects policy success through six key variables: policy standards and objectives, resources, characteristics of the implementing agents, disposition of implementors, inter-organizational communication, and social, economic, and political environment. Data collection techniques were conducted through in-depth interviews, observation, and documentation studies, using purposive sampling for informant selection, complemented by source triangulation to ensure data validity.

The results show that the implementation of the P4GN program by BNNP West Sumatra, especially in the prevention function, still faces significant structural and substantial obstacles in the field. Regarding the policy standards and objectives variable, there is a shift in orientation where the policy goals that should be transformative in changing public behavior are reduced to merely fulfilling quantitative-administrative targets. The resource variable shows a sharp disparity in budget allocation, where the budget for direct community prevention activities is very limited. This triggers regional inequality, where programs are concentrated in Padang City, while other regencies/cities that are geographically distant and prone to illicit drug trafficking are underserved. Institutional limitations are also evident from the fact that only 4 BNNK have been formed to serve 19 regencies/cities. The characteristics of the implementing agents tend to be rigid because the bureaucratic focus is centered on internal hierarchical compliance rather than adaptive prevention innovations. From the disposition aspect, implementors accept the policy in a top-down manner. Inter-sector communication and coordination remain formalistic and fragmented. Lastly, the social environment is not yet fully supportive due to the strong negative stigma and public resistance toward former drug users, and the designed programs lack integration with the local socio-cultural context of West Sumatra.